



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DIREKTORAT LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUBDIT FASILITASI BAHAN DAN ANALISA**

Nomor SOP	
Tgl. Pembuatan	
Tgl. Revisi	
Tgl. Efektif	
Disahkan oleh	Plt. Direktur Jenderal Perundang-undangan <u>Dr. Mualimin Abdi, SH, MH.</u> NIP. 19621121 198203 1 001
NAMA SOP :	Peraturan Penyiapan Resume Permohonan

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Kualifikasi Pelaksana :

1. Mempunyai kemampuan analitis.
2. Mempunyai kemampuan pemilahan data

Keterkaitan :

1. SOP Tata Usaha
2. SOP Koordinasi dan Monitoring Persidangan
3. SOP Penyusunan Keterangan Pemerintah

Peralatan / Perlengkapan :



1. Komputer/Printer/Scanner
2. Jaringan Internet

Peringatan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat sistem kerja di lingkungan Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
										
9	Menerima resume permohonan pengujian peraturan perundang-undangan yang telah ditandatangani oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan						resume permohonan pengujian peraturan perundang-undangan			